

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **3.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Kampung Dukwia**

Secara konsep, istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan, Arti dari akuntabel itu sendiri adalah: (1), dapat dipertanggung jawabkan, dapat menjawab pada atasan sebagaimana manusia bertanggung jawab kepada Tuhan-nya atas apa yang telah ia lakukan. (2) memiliki kemampuan untuk dipertanggung jawabkan secara ekplisit, dan yang (3), sesuatu yang bisa diperhitungkan atau dipertanggung jawabkan. (Waluyo, 2007)

Sementara itu (Abu-Tapanjeh, 2009) menyatakan bahwa (dari segi akuntansi), akuntabilitas disebutnya sebagai aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial dimana hukum telah dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan tersebut telah tercapai.

Dari identifikasi masalah penelitian, penulis identifikasi masalah sebelum memasuki Lokasi penelitian, adalah sebagai berikut :

(1), Pengelolaan dana desa terkesan tidak transparan dan tidak akuntabel.

Artinya, tidak terlihat aspek-aspek pengelolaan anggaran yang benar, yakni tidak ada keterbukaan dalam perencanaan pembangunan termasuk perencanaan anggaran sesuai ketentuan. Selain itu, pelaksanaan pembangunan belum mencapai target, sebagai akibat dari lemahnya sistem perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan anggaran dari alokasi dana desa; lalu tidak adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas dan pasti (transparansi) keuangan melalui sistem atau aplikasi keuangan kampung Dukwia.

(2) Pembangunan terlihat biasa saja tanpa ada perubahan yang berarti.

Maksudnya bahwa, ada anggaran yang digunakan untuk membangun kampung tapi kampung seperti biasa-biasa saja dan belum ada perubahan yang signifikan. Pembangunan masih berjalan di tempat.

(3) Lemahnya kualitas aparatur kampung dalam mengelola anggaran kampung yang cukup besar, sehingga hal itu berimbas pada tata kelola keuangan kampung dan akselerasi pembangunan kampung Dukwia Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom.

Dari ketiga persoalan ini, penulis berupaya untuk mengungkapkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Akselerasi Pembangunan di Kampung Dukwia melalui hasil penelitian sebagai berikut :

## **Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.**

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa ditafsirkan sebagai situasi yang menjelaskan proses perencanaan pengelolaan anggaran dana desa secara terbuka bersama masyarakat. Hal ini terlihat melalui hasil wawancara penulis dengan informan sebagai berikut :

“....Iya, semua melalui musyawarah. Perencanaan yang disesuaikan dengan arah kebijakan yang dituangkan dalam Permendesa, PMK, dan diselaraskan dengan kebutuhan utama masyarakat, walaupun tidak semua 100 persen.” (*wawancara informan 01*)

Hal yang sama juga disampaikan informan lain yang penulis temui di lapangan yang menyebutkan sebagai berikut :

Jadi Pembagian Dana Desa yang ada dalam Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) mengikuti petunjuk Teknis yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 146 dan Peraturan Menteri Desa. Dan berikut ini tabel Dana Desa yang di terima Kampung Dukwia. (*wawancara informan 02*)

**Tabel .01**  
Dana Desa yang diterima Kampung Dukwia yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
I	<b>DANA KAMPUNG</b>	<b>1.378.905.647</b>	
1.1	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG</b>	<b>578.778.390</b>	<b>DD</b>
1.2	<b>Sub Bidang Pendidikan,</b> Pengadaan Seragam & Buku	<b>15.000.000</b> 15.000.000	DD
1.3	<b>SubBidang Kesehatan,</b> PMT Balita PMT Lansia PMT PAUD/TK Distribusi Kelambu	<b>30.000.000</b> 12.000.000 9.000.000 8.000.000 1.000.000	
1.4	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum,</b>	<b>533.770.000</b>	

	Pembangunan Jembatan Jalan Usaha 1 ( 2 Unit)	104.778.000	DD
	Penimbunan Jembatan Jalan Usaha 1 ( 2000 M)	180.000.000	DD
	Pagar Makam (50 M)	54.000.000	DD
	Tempat Penyimpanan Alat Makam	30.000.000	DD
	Lampu Makam	20.000.000	DD
	Pafing Blok Makam	25.000.000	DD
	Pelebaran Jalan RT 5& RT 7	120.000.000	DD
<b>2</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG</b>	<b>40.000.000</b>	<b>DD</b>
<b>2.1</b>	<b>Sub Bidang Ketentraman,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat,</b>		
			DD
<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan,</b>	<b>30.000.000</b>	
	Pembinaan Sanggar Dukwia	5.000.000	DD
	Pembinaan Marawis Dukwia	5.000.000	DD
	Bantuan Keagamaan	20.000.000	DD
<b>3.3</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaaan dan Olah Raga,dan</b>	<b>10.000.000</b>	
	ATK & Operasional Karang Taruna	10.000.000	DD
<b>3.4</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>-</b>	
			DD
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG</b>	<b>44.900.000</b>	<b>DD</b>
<b>3.1</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung,</b>	<b>20.000.000</b>	
	Pelatihan Seskeudes	20.000.000	DD
<b>3.2</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</b>	<b>24.900.000</b>	
	Insetif Ketua PKK	3.000.000	DD
	Insetif Sekretarsi PKK	2.400.000	DD
	Insetif Bendahara PKK	14.400.000	
	Insetif Anggota PKK	2.700.000	
<b>4</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT KAMPUNG</b>	<b>259.200.000</b>	<b>DD</b>
<b>4.1</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>259.200.000</b>	
	BLT DD (72XRp. 300.000x 12 Bulan)	133.200.000	DD
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.378.905.647</b>	<b>DD</b>

**Tabel .02**  
Dana Desa yang diterima Kampung Dukwia yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
I	<b>DANA KAMPUNG</b>	<b>1.062.913.000</b>	
1.1	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG</b>	<b>578.778.390</b>	<b>DD</b>
1.2	<b>Sub Bidang Pendidikan,</b>	<b>15.000.000</b>	
	Pengadaan Seragam SD & MI	15.000.000	DD
1.3	<b>SubBidang Kesehatan,</b>	<b>30.000.000</b>	
	PMT Balita	12.000.000	DD
	PMT Lansia	9.000.000	DD
	PMT Anak Sekolah	8.000.000	DD
1.4	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum,</b>	<b>252.897.360</b>	
	Pelebaran Jalan RT 1 dan 2 @ 800x7 M	200.000.000	DD
	Pembuatan Gapura tinggi 3 M lebar 0,3 persegi	52.897.360	DD
2.1	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG</b>		<b>DD</b>
2.2	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga,</b>	<b>5.000.000</b>	
	ATK dan operasional Karang Taruna	5.000.000	
	<b>Sub Bidang Kemasyarakatan</b>	<b>30.000.000</b>	
	Kegiatan Hut RI ke 74	30.000.000	
3.1	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG</b>		<b>DD</b>
3.2	<b>Sub bidang Pertanian dan Peternakan</b>	212.582.600	
	Pengadaan Pupuk Peternian dan Racun Rumput	142.400.000	DD
	Jembatan Gorong Mini 6 Unit	70.182.600	
3.3	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</b>	<b>5.000.000</b>	<b>DD</b>
	ATK dan Operasinal PKK	5.000.000	
4.1	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARAUAT KAMPUNG</b>	<b>513.433.040</b>	
4.1	<b>Sub Biadang Penaggulangan Bencana</b>		<b>DD</b>
	Pencegahan Covid 19	85.033.040	
4.2	<b>Sub Bidang Kedaaan Menadesak</b>		<b>DD</b>
	Bantuan Lansung Tunai @ 119 KPM 300x12 Bulan	428.400.000	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.062.913.000</b>	

Pada sisi yang lain, informan menyebutkan bahwa pemanfaatan dana desa itu harus dibahas secara musyawarah dengan prioritas yang disepakati bersama dengan pemenuhan prosentase prioritasnya. Hal itu terlihat dalam keterangan informan yang penulis himpun berikut ini :

“...Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Permendesa bahwasanya prioritas penggunaan dana desa yang dikelola pemerintah kampung wajib memenuhi prosentase prioritas tersebut.(*Wawancara Informan*)

Terkait kendala-kendala dalam menghadirkan masyarakat dalam perencanaan maupun pemanfaatan dana-dana desa, direspon informan sebagai berikut :

“...kendala utama yang ada ialah dikarenakan kurangnya masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan maupun pemanfaatan dana desa maka dalam kehadiran untuk musyawarah kampung Kurang...”(*Wawancara Informan*)

### **Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kampung**

Pelaksanaan Pembangunan dimaknai sebagai keadaan yang menjelaskan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan berdasarkan hasil kesepakatan dalam perencanaan bersama masyarakat di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom.

Berdasarkan konsep dan pernyataan diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba mewawancarai informan terkait dengan proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom yang terlihat sebagai berikut :

“....Proses setelah musyawarah masih sangat panjang, dari penyusunan Dokumen RKPKN lengkap, Pemutakhiran IDM & SDGs, Penyusunan

Perkades dan Perkam, barulah menginjak proses penjemputan Anggaran untuk direalisasikan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang telah tersusun. (*Wawancara informan-02*)

Selain itu, informan (01) mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kampung Dukwia dilakukan sesuai dengan petunjuknya dengan prioritas pada bidang-bidang yang telah ditetapkan bersama dalam perencanaan dan disesuaikan dengan ketentuan yang dapat dilihat pada keterangan informan berikut ini:

“....Dana Desa diarahkan untuk membiayai bidang kesehatan, pendidikan, Stunting, Bumdes, Bantuan langsung Tunai (BLT), serta pembangunan keberlanjutan (*wawancara informan 01*)

Selain arah dan tujuan pemanfaatan dana tersebut setidaknya dalam perencanaan pembangunan di Kampung Dukwia juga melibatkan masyarakat, melalui perwakilan dan tokoh-tokoh dalam masyarakat, hal ini terlihat dalam hasil penelitian yang penulis rangkum sebagai berikut :

“ karena bagaimanapun dalam lingkup kampung, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengajukan sebuah program pembangunan yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kampung setempat (*Wawancara informan*)

Sementara, keterlibatan komponan dalam perencanaan pengelolaan dana desa disinggung oleh informan sebagai berikut :

“...Komponan Kesehatan, Komponen Pendidikan, Komponen Keagamaan, Komponen Pemuda, Komponen Perempuan, Komponen Kelompok Tani” (*Wawancara Informan*).

Informan juga menjelaskan terkait minimnya kehadiran perwakilan masyarakat atau prosentase prioritas dalam rapat perencanaan, seperti terlihat dalam hasil wawancara berikut ini :

“...kendala utama kita adalah masyarakat kurang berpatisipasi dalam perencanaan dan pemanfaatan dana desa padahal kehadiran mereka dalam rapat untuk musyawarah kampung sangat diharapkan sehingga kita bisa saling terbuka dan tetapkan secara bersama...” (*Wawancara Informan*)

### **Pengorganisasian Pengelolaan Dana Desa**

Pengorganisasian dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu kondisi yang menggambarkan adanya pembagian dana kampung yang dilakukan oleh Aparatur Kampung Dukwia sesuai peruntukannya dengan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis berhasil mewawancara informan dan berhasil mendapatkan keterangan informan sebagai berikut :

“...yang menjadi prioritas untuk dibiayai dari dana tersebut di kampung Dukwia adalah bidang kesehatan, pendidikan, Stunting, urusan Bumdes, Bantuan langsung Tunai dan pembangunan keberlanjutan.” (*wawancara informan*)

Selain prioritas, setidaknya masyarakat telah dianggap menyetujui prioritas program ini karena telah mendapatkan persetujuan bersama dalam rapat perencanaan bersama untuk mengalokasikan anggaran dana desa atau dana kampung ini. Hal ini terlihat juga dalam keterangan yang diberikan informan dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“...Sampai saat ini kami melihat hampir seluruh masyarakat menerima dengan baik, mereka tidak memberi reaksi yang berarti. Itu artinya bahwa mereka menyetujui apa yang telah diputuskan bersama untuk kelanjutan pembangunan di Kampung Dukwia, Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom”.(*wawancara informan*)

### **Penggerakan Pemanfaatan dana desa**

Penggerakan dimaknai sebagai keadaan yang menjelaskan pemanfaatan dana kampung yang dilakukan oleh aparatur kampung dan masyarakat sesuai

ketentuan yang ada. Itu sebabnya dalam penelitian ini, penulis mencoba mewawancara informan sebagai wakil dari masyarakat untuk memastikan bahwa pemanfaatan dana kampung atau dana desa tersebut sesuai tujuan pemanfaatannya. Hal ini terlihat dalam hasil wawancara penulis bersama informan sebagai berikut :

“..Tujuan pemanfaatan dana desa sudah pasti untuk mengangkat perekonomian warga Masyarakat, mengurangi resiko stunting melalui pemberian PMT, mengurangi beban Pendidikan anak-anak sekolah melalui bantuan Pendidikan, membantu mengurangi beban Masyarakat melalui pemberian BLT, mendatangkan income bagi kampung melalui pemanfaatan BUMDesa, serta memaksimalkan sarana prasarana kampung..”(*Wawancara Informan*)

Dari keterangan informan dapat dipahami bahwa tujuan pemanfaatan dana kampung ini sangat strategis untuk mendorong akselerasi pembangunan kampung sehingga kampung Dukwia dapat tumbuh dengan cepat sehingga mampu bersaing dengan kampung-kampung lain dalam Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom.

Berkenaan dengan penggerakan dalam pengelolaan dana desa guna meningkatkan akselerasi pembangunan ini setidaknya memiliki perhatian tersendiri, karena sesuai hasil penelitian ini penulis berhasil menghimpun keterangan informan sebagai berikut :

“...sebenarnya kita di kampung ini sangat membutuhkan pendampingan yang lebih, terutama oleh dinas terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Keerom dan Pendamping Kampung, serta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur kampung butuh ditingkatkan”, (*wawancara informan*).

Dari keterangan informan ini, penulis pahami bahwa kampung membutuhkan orang-orang yang bisa terlibat secara aktif untuk mendorong

penguatan kapasitas baik SDM aparatur, maupun kapasitas sistem dan kapasitas organisasi. Untuk mendorong penguatan kapasitas itu, sebenarnya dapat dipandang sebagai upaya penggerakan pemanfaatan dana desa baik oleh dinas terkait seperti dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung, atau oleh pendamping kampung sehingga kehadiran mereka dapat menjadi daya dorong bagi pemanfaatan dana desa yang lebih tepat dan akurat dalam kaitannya dengan menyukseskan pembangunan kampung Dukwia dengan dana desa yang ada.

### **Pengawasan Pengelolaan Dana Desa**

Pertanggungjawaban keuangan merupakan keadaan yang menjelaskan upaya-upaya aparatur kampung dalam mempertanggungjawabkan pemanfaatan keuangan kampung (dana desa) yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan kampung yang telah direncanakan bersama.

Kendati pertanggungjawaban sebagai sebuah keharusan, namun setidaknya proses pengawasan terhadap pengelolaan dana desa atau dana kampung ini pun perlu dilakukan mengingat potensi penyimpangan yang dapat saja dilakukan apabila ada kesempatan. Itu sebabnya berdasarkan hasil penelitian ini penulis mendapatkan keterangan dari wawancara informan yang dirangkum sebagai berikut :

“...Pengawasan dilakukan secara langsung oleh masyarakat, dan untuk lebih khususnya Badan musyawarah Kampung (Bamuskam) dikarenakan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pendamping Desa, serta DPMK (**Wawancara informan**).

Dijelaskan informan bahwa kewenangan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) sesuai SK yang diberikan oleh Bupati, mewakili seluruh Masyarakat

Kampung Dukwia, sehingga secara organisasi setidaknya Bamuskam wajib melaksanakan tugasnya dengan tetap berpegang para prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah hasil penelitian yang penulis rangkum sebagai berikut :

“...kewenangan yang dimiliki Bamuskam untuk mengawasi apabila ada penyimpangan pemanfaatan dana desa yakni dengan menegur secara lisan dalam musyawarah kampung antara Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dengan Pemerintah Kampung , secara tertulis serta meluruskan pemanfaatan/ penggunaan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Kampung. (*Wawancara Informan*)

Terkait laporan pertanggungjawaban keuangan, menurut informan disampaikan kepada kepala Distrik, Tenaga Ahli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Keerom. Hal ini terlihat dalam keterangan informan sebagai berikut :

“..LPJ Kampung disampaikan kepada Distrik, Tenaga Ahli, Dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Keerom (*wawancara informan*)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pertanggung jawaban pun tidak bisa dipisahkan dari pengawasan oleh kepala distrik, dinas terkait dan seluruh masyarakat, termasuk Bamuskam Dukwia.

### **3.2. Faktor-faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Kampung Dukwia**

Secara konsep, faktor penghambat dapat dimaknai sebagai aspek-aspek yang menjadi penyebab terhambatnya tata kelola pemanfaatan dana desa untuk

peningkatan akselerasi pembangunan Kampung Dukwia, Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat aspek-aspek yang menjadi penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan akselerasi pembangunan di Kampung Dukwia Distrik Arso barat, sebagaimana yang terlihat dalam keterangan informan berikut ini :

“...salah satu faktor adalah belum terlaksananya System Keuangan Kampung (Siskeudes dan kampung belum memiliki website yang merupakan wadah aspirasi, pertanggungjawaban serta transparansi. (*wawancara informan*)

Selain itu, informan lain juga mengatakan bahwa faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan dana desa atau Kampung Dukwia ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan dari instansi teknis terkait. Hal ini dapat dilihat pada keterangan informan yang penulis rangkum berikut ini :

“...Membutuhkan pendampingan yang lebih, terutama oleh dinas terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Keerom & Pendamping Kampung, serta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur kampung butuh ditingkatkan.” (*wawancara informan*)

Pada sisi lain, informan juga mengatakan bahwa faktor penghambat lainnya karena rendahnya kapasitas aparatur kampung sehingga membutuhkan pembimbingan dan pelatihan-pelatihan yang bersifat meningkatkan kapasitas mereka. Hal ini terlihat dalam keterangan informan berikut ini :

“Mereka (aparatur kampung) butuh mendapatkan pelatihan-pelatihan pengelolaan dana-dana desa sehingga dari pelatihan itu bisa tingkatkan kapasitas aparatur kampung. Mereka membutuh penguatan kapasitas sebenarnya.” (*wawancara informan*)

Pelatihan dan pendampingan itu penting, karena berdasarkan hasil penelitian penulis temukan bahwa ada faktor lain sebagai penghambat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Dukwia, Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom disebabkan juga oleh tidak adanya sistem pengawasan yang baik oleh kepala kampung, karena berdasarkan hasil wawancara informan terkait laporan keuangan oleh Kepala Urusan Keuangan kepada kepala kampung, terlihat bahwa belum adanya sistem pelaporan yang sistematis dan terstruktur. Hal ini terlihat dalam keterangan informan sebagai berikut :

“Belum, ini salah satu PR yang butuh diperbaiki kedepan”  
*(wawancara informan)*